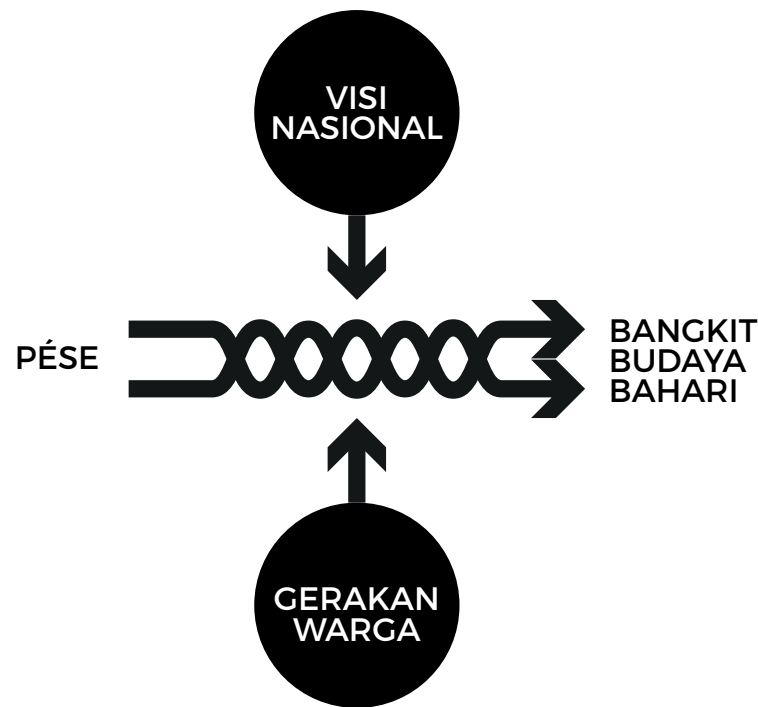


sebuah ajakan kerja bersama

BANGKIT BUDAYA BAHARI

Disusun oleh aikon - Program Pése
Yayasan Pikir Buat Nusantara
Februari 2018



PENDAHULUAN

Dalam rentang sejarah moderen Indonesia, terdapat pencapaian puncak perjuangan intelektual yang tercatat sebagai peristiwa budaya bangsa bhineka ini:

- Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan Tanah Air Indonesia menunjukkan bukti kesadaran geografis akan jati diri sebagai bangsa lautan yang ditaburi pulau-pulau;
- Proses musyawarah mufakat lahirkan Pancasila sebagai dasar dalam bernegara dan berbangsa, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dan bulat tekad Proklamasi Kemerdekaan NKRI 17 Agustus 1945;
- Ide orisinal Deklarasi Djuanda 1957 sebagai pemakluman unilateral yang tahun 1982 diakui dunia internasional dan di adopsi menjadi Konvensi Hukum Laut - United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Pergulatan intelektual sebagai proses peristiwa budaya yang dimulai dari ruang-ruang sosial melalui dialog intensif para Bapak Bangsa ini, merupakan kesadaran geopolitics dan fakta bineka geoculture yang mengerucut pada wawasan nusantara sebagai bangsa merdeka. Wawasan kebangsaan dengan keutuhan wilayah tanah air yang berbentuk kepulauan nusantara dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Namun sayang, kedaulatan dan keutuhan wilayah yang menjadi modal Indonesia dalam merencanakan strategi pembangunan nasional secara utuh menyeluruh, tidak diteruskan oleh para pelanjut tata negara yang terlalu lama terlena. Kebijakan berorientasi laut yang duapertiga perairannya melingkupi luas 5.193.250 kilometer Tanah Air Indonesia, dilupakan dan dipinggungi negarawan yang fokus membangunnya lebih ke darat. Kesadaran geografis sebagai 'negara lautan bertabur pulau-pulau' yang telah diperjuangkan pendiri bangsa, baru berdekade kemudian menggugah lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Yang disusul regulasi turunan Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

Dokumen bermuatan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang menegaskan bahwa perlu percepatan pembangunan kelautan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Guna mengelaborasi target-target besar program pembangunan kemaritiman dan kelautan bagi kesejahteraan rakyat sesuai Visi Presiden Joko Widodo “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”, dan bagian dari upaya memperkuat jati diri sebagai negara maritim tercantum dalam misi kesatu dan keenam, yaitu:

- “Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan”;
- “Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional”.

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019 terdiri atas lima kluster program prioritas:

1. Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim;
2. Industri Maritim dan Konektivitas Laut;
3. Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan Serta Pengelolaan Lingkungan Laut;
4. Pertahanan dan Keamanan Laut;
5. Budaya Bahari.

Memasuki tahun keempat doktrin Poros Maritim Dunia, telah cukup banyak capaian yang diraih dari empat kluster program prioritas, namun program Budaya Bahari sebagai ruh pembentuk identitas jiwa bangsa bahari belum bangkit terbangun. Maka upaya menerus menggugah kesadaran komunal bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia adalah pewaris Peradaban Bahari sangat mendesak diaktifkan. Program Bangkit Budaya Bahari berusaha menjadi salah satu upaya itu, dengan menekankan daya emotif pése yang bermakna “rasa kemanusiaan adil beradab yang menyalakan semangat rela berkorban”, sebagai etos gerakan nasional.

PERUMUSAN MASALAH

Rentang wilayah darat Merauke di ujung timur hingga pulau terdapan di barat Pulau Rondo, dan bentang pulau terluar di utara Pulau Miangas hingga Pulau Deli di selatan, merupakan tantangan nyata membangun wilayah perairan maha luas Indonesia. Butuh paradigma tangguh memandang laut sebagai pemer-satu fitrah taburan 17.504 pulau, dan keahlian lintas ilmu dalam menata ruang laut berbasis konektivitas guna mereduksi senjang antarwilayah. Termasuk pentingnya rancang bangun khusus yang belum terumuskan dalam kebijakan negara, tentang bentuk otonom pemerintah daerah yang wilayahnya dalam kepungan perairan dengan darat terbanyak pulau-pulau kecil.

Dalam bentangan luas wilayah perairan ini, terbuka lintasan internasional yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lima wilayah *choke points* di cekungan Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai-Wetar. Fakta geostrategis ini rentan terhadap berbagai bentuk ancaman yang mudah dilintasi kapal penyelundup dan perdagangan manusia, perusakan sumber daya kelautan, pencurian Benda Muatan Kapal Tenggelam, dan pencurian kekayaan perikanan laut. Ancaman berkaitan dengan *Illegal Unreported, and Unregulated Fishing* sebagiannya telah tertangani dengan kebijakan tegas Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dalam waktu tiga tahun telah menenggelamkan lebih dari 300 kapal pencuri ikan. Ditandai dengan terjadinya peningkatan jumlah stok perikanan di semua wilayah tangkapan ikan, dan berdampak positif dengan tumbuhnya kesejahteraan nelayan tradisional yang selama ini terpinggirkan. Bukti peningkatan efektif Pertahanan dan Keamanan Laut sebagai satu dari lima kluster strategi kebijakan kelautan telah memberikan hasil nyata, yang diikuti peningkatan kluster industri perikanan lokal untuk pemenuhan kebutuhan nasional maupun ekspor.

Sisi capaian dua kluster ini tidak menutupi kompleksitas masalah kelautan yang nyatanya memang belum semuanya tertangani dalam waktu relatif singkat, sejak pencanangan Poros Maritim Dunia lebih tiga tahun lalu. Untuk itu perlu dilakukan segala upaya yang konsisten terarah guna meneguhkan kembali jati diri

sebagai bangsa penakluk Samudera. Butuh kerja cerdas mumpuni menyatupadukan seluruh daya yang ada dari segenap disiplin ilmiah tersedia saat ini, berikut serta upaya konstruksi adaptif warisan pengetahuan tradisi kebaharian. Tantangan berkah potensi sumber daya kelautan yang tumpah ruah dengan limpahan fakta sejarah kejayaan maritim di masa lalu, seharusnya cukup menjadi pegangan untuk kita makin semangat bangkitkan kembali kejayaan maritim Nusantara.

Disinilah arti penting pemilihan kluster Budaya Bahari agar jadi fokus program yang krusial untuk segera ditindaklanjuti. Di samping belum tergarap secara terintegrasi dibanding empat kluster lainnya, program Budaya Bahari bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap wawasan bahari di segenap lapisan masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan kelautan nasional yang sinambung dan lestari. Sesuai prinsip partisipasi dimana seluruh pemangku kepentingan diharapkan: mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan peran masing-masing; memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya; menjamin adanya representasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan ikut menjadi aktor dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang; serta memanfaatkan sumber daya secara adil.

SASARAN PROGRAM

Doktrin Poros Maritim Dunia direalisasikan melalui Bangkit Budaya Bahari, sebuah program yang bertujuan untuk membangkitkan dan mendorong pemahaman wawasan dan budaya bahari. Wawasan budaya bahari bukanlah konsep yang dapat dipergunakan seperti obat mujarab untuk segera menjawab berbagai permasalahan, melainkan merupakan proses dalam mewujudkan gugus pengetahuan budaya yang mengalir makin menggelora dan memberdayakan warganegara dalam menghadapi tantangan menjadikan laut sebagai ruang hidup, berjuang, belajar, berkarya, bekerja, berolahraga, dan berekreasi.

Proses internalisasi pengetahuan budaya bahari secara terus-menerus hingga memperluas dan sekaligus memperdalam wawasan budaya bahari harus melembaga. Bangun aturan pranata ini begitu penting untuk dapat menjamin hari esok yang lebih baik bagi lintas generasi dengan adab-adat terpendam sifat-sifat jiwa; gotongroyong, keuletan, kerja keras, kemandirian, pelayanan kollektif, merdeka berekspresi, persaudaraan sederajat, toleran harga perbedaan, dan rawat harmoni lingkungan ciptaNYA.

Untuk menuju pelebagaan gerakan perlu identifikasi dan inventarisasi nilai budaya bahari sebagai hulu aktivitas, yang hasilnya di samping menjadi sumbangan sistem kebudayaan nasional juga keluarannya menjadi bagian industri budaya yang sangat relevan bermuara di sektor Ekonomi Kreatif dan Pariwisata - dua sektor pendorong pertumbuhan tinggi dalam pembangunan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan dasar komunitas terlibat didalamnya. Di saat bersamaan, secara paralel program penanaman nilai ini melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari.

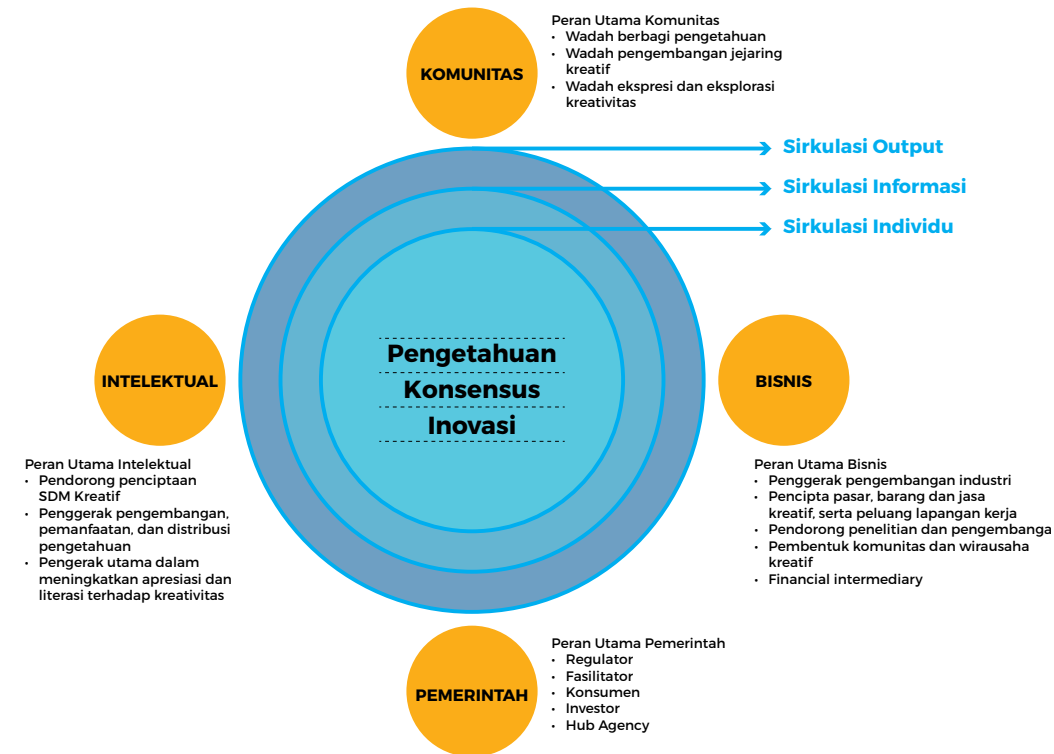
Mengingat kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan dan menjadi pedoman tingkah lakunya, bila pembangunan mengacu pada kebudayaan maka secara manajerial: sejak perencanaan, proses penerapan, hingga evaluasi keberhasilan yang dimaksud adalah **Membangun Ruang Sosial**.

Ruang Sosial merupakan pranata kelembagaan yang nyata dan sangat diperlukan untuk memfasilitasi hubungan positif, saling menguatkan antara aktor-aktor utama *quadra-belix* yang terdiri dari unsur: Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas. Melalui ruang sosial, intensitas interaksi dan komunikasi dalam sirkulasi segenap pemangku kepentingan ulir *quadra-belix* berlangsung dan diformulasikan sebagai suatu gerakan yang tak berkesudahan. Ruang Sosial akan membuka jalan terbentuknya 'ruang pengetahuan', mengikat kesepakatan dan komitmen dalam 'ruang konsensus', dan menjadi arah terbentuknya 'ruang inovasi'. Bila saja peran para aktor ini berjalan penuh, maka ekosistem industri budaya berkaitan dengan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata dengan sendirinya tumbuh terbentuk secara organik dalam suatu lingkungan sirkulatif interaktif.

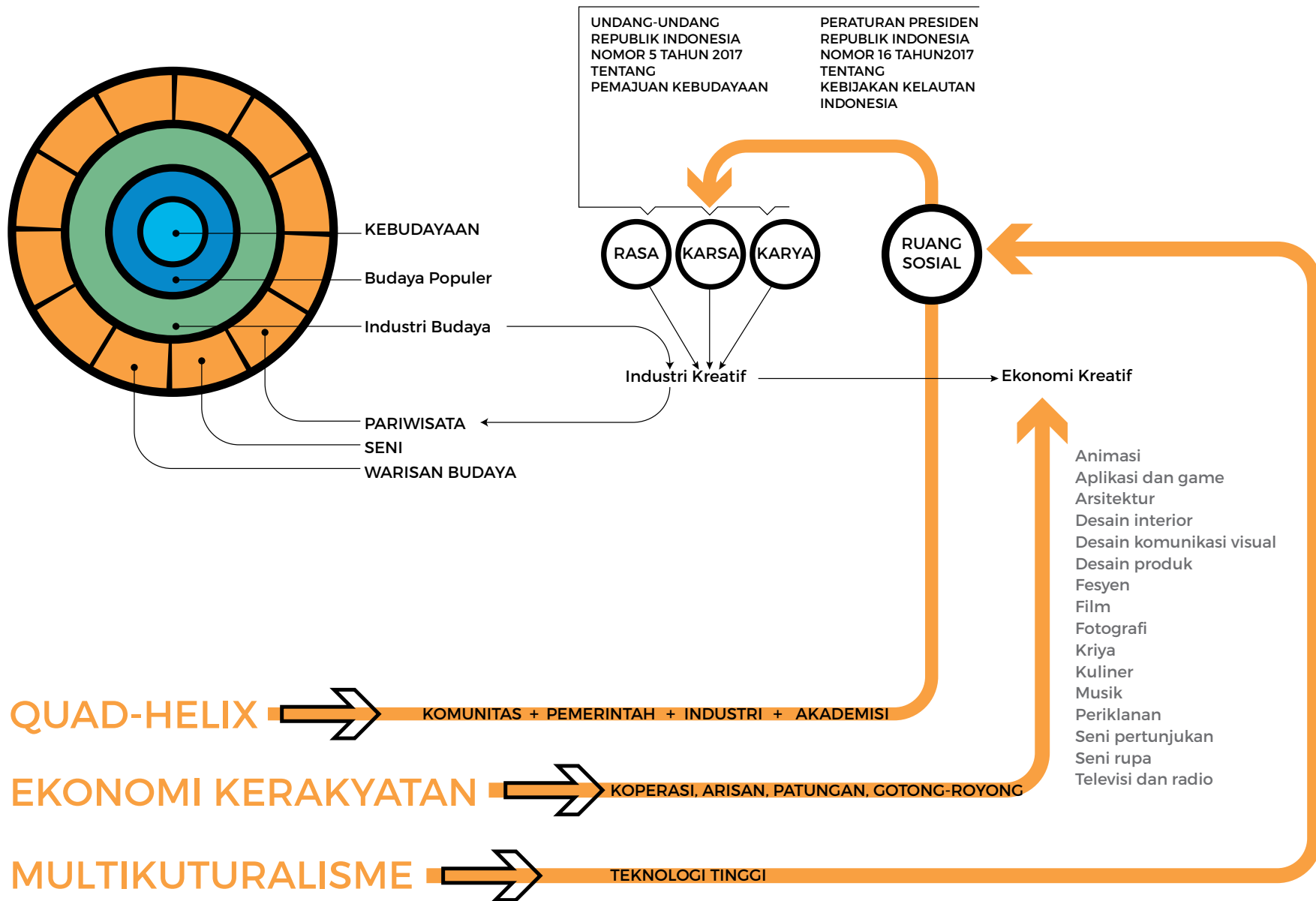
Sebuah proses panjang yang lebih manusiawi pembentang kesinambungan, karena individualitas warga negara terakomodasi langsung secara setara dalam komunitas yang mendorong keseluruhan nilai diperlukan bagi perkembangan kemanusiaan adil beradab. Kegotong-royongan, kolaborasi, sinergi *quadra-belix* merupakan penggerak bagi lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan dan teknologi yang penting demi tumbuhnya industri kreatif termasuk pariwisata dan sektor lain terkait.

Pembelajaran yang dimulai dengan dialog, memungkinkan anggota kelompok, mengesampingkan asumsi pribadi, masuk ke alam pikiran bersama yang murni. Dialog sebagai pertukaran pikiran yang dinamakan 'musyawarah-mufakat' oleh para pendiri republik kita, arena peredaran bebas makna yang memungkinkan kelompok secara bersama menemukan pengertian mendalam yang tidak mungkin diperoleh sepihak terpisah para individualis.

Inilah interaksi kultural yang membuat ruang sosial menjadi arena hidup bersama, wujud realitas nyata kehadiran manusia maknawi keinginan dan harapan tindak lakunya. Makna yang jauh lebih tinggi dari hidup sekedar cukup sandang pangan papan, bahkan punya kekayaan berlimpah. Suatu lingkungan hidup sejahtera lahir batin bersama yang kondusif bagi perkembangan warganegara, dimana setiap orang menjadi dan merasa diri *to be more* tidak hanya *to have more*.



APA:



KEGIATAN

Pulauku NOL Sampah, merupakan kegiatan konservasi lingkungan di dalam sebuah strategi senyap yang mendorong kembalinya budaya bahari. Di dalam kegiatan Pulauku NOL Sampah warga didorong untuk berinisiatif, bergiat bersama melakukan penyebarluasan pola pengembangan sumberdaya kebudayaan (*cultural resources*) dan mengaktifkan simpul jaring modal sosial (*social capital*). Kohesi ikatan kedua entitas ini dapat ditransformasikan sebagai kekuatan untuk meneguhkan keadaban dan muruah martabat kemanusiaan yang berkeadilan.

Kebudayaan bahari sebagai wacana direalisasikan dengan proses kerja bersama antarwarga pulau dalam menangani persoalan sampah di pemukimannya. Kegiatan ini dapat menjadi sangat relevan ditempatkan sebagai laku perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan bahari demi mengembalikan martabat komunitas pulau-pulau kecil yang tersisih selama ini. Kedalaman gerakan budaya nir-ucap, berbuat nyata secara praktis, memampukan individualitas dalam kebersamaan komunitas yang menyentuh sisi kemanusiaan berdimensi spiritual, mental, dan fisik, yang tentunya erat berkaitan dengan nilai menjaga keseimbangan lingkungan.

Kegiatan Pulauku NOL Sampah tidak semata merupakan aktivitas di dalam bilik lingkungan fisik alami yang berdiri sendiri. Gairahnya perlu didampingi denyut ekspresi melalui kerja kesenian dengan visi prospektif tertanam bersama, yang akan mendorong kreativitas komunal sebagai pemicu berbagai inovasi dengan komitmen peduli pada daya dukung lingkungan.

Menuju Pulauku NOL Sampah beberapa rangkaian aktivitas telah disiapkan oleh Rumah Hijau komunitas Pulau Pramuka dan Lab Teater Ciputat yang bertahun kerjabersama orang pulo Kepulauan Seribu. Rangkaian kegiatan tahap 100 hari pertama yang telah dimulai per 21 November 2017 akan berpuncak pada peringatan Hari Sampah Nasional 21 Februari 2018, dan berlanjut sepanjang tahun 2018 sesuai tahapan per kuartal.

A. Mandiri Kelola Sampah

Rangkaian kegiatan dengan target telah ditetapkan oleh komunitas Rumah Hijau di Pulau Pramuka seperti tercantum pada tabel berikut, dengan tujuan jadikan rumah warga menjadi rumah yang sehat dan produktif. Gerakan di Rumah Hijau jadi gerakan budaya yang lebih luas melalui siklus edukasi, kerjakan, apresiasi.

Saat ini sampah domestik belum sistemik dikelola dengan efek budaya bersih yang melibatkan tanggungjawab orang pulo. Untuk itu sangat penting mengajak masyarakat yang dapat mandiri mengelola sampahnya sendiri dari rumah, dengan harapan hasil tidak ada lagi tong sampah di jalanan pemukiman di pulo yang malah bikin kumuh dan menjadikan warga kian malas untuk mengurus sampahnya. Rumah Hijau berupaya secara swadaya membangun kemandirian tersebut berbasis Rumah Tangga, beberapa kegiatan yang telah dan sedang berlangsung meliputi:

1. Memilah dan mendaur ulang sampah an organik ekonomis.
2. Menyediakan Lubang Resapan Biopori, tempat menyimpan sampah organik skala rumah tangga untuk keperluan pemulihan air tanah, mengurangi genangan, menyediakan kompos.
3. Membuat kebun organik di halaman rumah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sayuran dari darat dan ketersediaan sayuran sehat skala rumah tangga.
4. Membuat produk kuliner kemasan dari dapur rumah tangga yang bisa dijual dan jadi oleh-oleh khas dan sehat.

Kegiatan Pulauku Nol Sampah Gerakan Pése telah diinisiasi komunitas Rumah Hijau, dimulai dari Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, Jakarta per September 2017 dan berpuncak pada Hari Sampah Nasional 21 Februari 2018

B. Wisata Eko-Budaya

Kepulauan Seribu sebagai satu dari beberapa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah ditetapkan pemerintah, tidak semata soal investasi dan infrastruktur, melainkan tentang bagaimana menempatkan orang lokal pada posisi sepatutnya. Wisata pemukiman yang berkembang saat ini diterjemahkan masyarakat pulo sebagai wadah transaksional semata. Setidaknya ada dua dampak buruk yang muncul yaitu dampak ekologis dan budaya. Tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, belum adanya regulasi yang membatasi berapa banyak penginapan boleh dibangun, berapa banyak tamu boleh berkunjung, berapa banyak air tanah yang boleh dipakai, berapa banyak orang boleh berenang/*snorkeling/di-ving* pada kawasan tertentu. Bahkan hingga saat ini belum diketahui apakah kita memiliki kalkulasi *ecological & cultural cost recovery* yang harus dikeluarkan untuk menghadapi dampak dari aktivitas wisata yang berkembang pesat.

Untuk pengembangan wisata pemukiman, penting membuka alternatif agar menempatkan penduduk tanpa terkecuali sebagai subyek kegiatan wisata, komunitas sebagai entitas ekonomi berbasis nilai budaya lokal. Satu di antara banyak metode yang dapat menjawab kepentingan tersebut adalah wisata budaya dengan pendekatan *live-in*. Dengan metode ini, maka pariwisata akan memberi daya dorong orang pulau sebagai manusia bermartabat tanpa menafikan kebutuhan ekonomi. Selain dapat sebagai satu diantara banyak cara untuk melakukan pintu penataan lingkungan sehat dan layak di pulau pemukiman, metode ini pun dapat turut mengendalikan pembangunan fisik yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata yang seringkali abai terhadap daya dukung lingkungan.

C. Aktivisme Seni

Pada **Tahap Pertama** yang berpuncak pada tanggal 21 Februari 2018, Lab Teater Ciputat (LTC) melakukan pendekatan kesenian yang diorientasikan pada kerja kolaborasi intensif. Target produksi pertunjukan yang melibatkan warga lokal. Pilihan pertunjukan kolaborasi LTC dengan komunitas Wayang Pulo di Pulau Pramuka ini diharapkan dapat segera membangun proses kerjasama yang efektif terkait dengan kebutuhan empat aspek kemanusiaan, antara lain; Intelektual, Fisikal, Emosional dan Spiritual. Di luar proses, LTC akan lakukan pemetaan ulang atas kebutuhan masyarakat pulo hari ini dengan keluaran aktivitas Pertunjukan Seni Nol Sampah yang memanfaatkan dan menghidupkan Hutan Kreatif Pulau Pramuka.

Berbarengan dengan proses itu, LTC mengundang sejumlah seniman potensial yang memiliki kepedulian pada isu kebaharian untuk terlibat program ini. Bentuknya, sejenis artist live in selama minimal dua minggu di pulau Pramuka-Panggang. Terdiri dari berbagai lintas disiplin kesenian, mulai dari seni pertunjukan, musik, tari, tari, sastra, patung, disain, kriya, film, lukis, dll. Mereka adalah seniman hasil seleksi ketat Tim Pése, seniman terpilih diharapkan dapat memahami kondisi masyarakat setempat dalam waktu singkat. Dengan referensi wajib baca buku “Orang Pulo di Pulau Karang” edisi pertama, pemahaman seniman terpilih akan alam dan budaya setempat itu akan diekspresikan di berbagai media yang menjadi keahlian mereka. Durasi waktu kerja satu bulan; Minggu pertama Januari, Minggu ketiga Januari, Intensif dua minggu pada 9-21 Februari 2018.

Tahap Kedua pendekatan kesenian diorientasikan pada penyempurnaan riset yang pernah dilakukan LTC tahun 2013, berupa revisi buku “Orang Pulo di Pulau Karang”. Beberapa hal yang perlu dimasukkan antara lain; Saran dari Bisri Efendi, catatan Mahariah, tradisi pulang babang, data perkembangan pulau hari ini, wawancara instansi kebudayaan, aktivitas swadaya masyarakat yang dilakukan komunitas hijau dan lainnya, serta kisah sukses orang pulau di negeri seberang. Dengan durasi kerja persiapan buku tiga bulan antara April-Mei, peluncuran buku akan dilakukan 6-7 Juli 2018.

Tahap Ketiga adalah pendampingan festival rakyat Pulau Babang. Tradisi masyarakat Kepulauan Seribu yang berarti kesadaran untuk pulang ke kampung halaman setelah melaut untuk waktu yang lama, kembali untuk keluarga dan masyarakat dengan keberkahan rezeki yang dibawa nelayan dari laut. Hajatan Pulau Babang yang didampingi LTC digelar pada 30 Mei – 2 Juni 2013 lalu di Plasa Pulau Pramuka dan Dermaga Pulau Panggang ini menjadi momentum penting bagi penguatan potensi budaya masyarakat kepulauan seribu, khususnya di Kelurahan Pulau Panggang. Mengokohkan nilai-nilai tradisi masyarakat setempat, menguatkan peran pemuda dalam proses internalisasi identitas budaya masyarakat Pulau Panggang, sekaligus menjadi momentum penyebarluasan potensi masyarakat yang memiliki nilai budaya, sejarah, sosial, ekonomi, dan ekologi. Kegiatan Festival ini akan lebih disempurnakan untuk bisa helar utuh pada 7-8 Desember 2018 dengan sekaligus bersamaan ikhtiar wujudkan hajat warga untuk memiliki Museum Budaya Pulau Panggang.



OUTPUT DAN OUTCOME

Program Bangkit Budaya Bahari diharap hasilkan *output* berupa:

1. Terbentuknya ruang-ruang sosial lengkap dengan berbagai kegiatan praksis yang berkelanjutan;
2. Ajuan Prosedur Standar Program Pulauku NOL Sampah, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Ajuan Prosedur Standar program sosialisasi Undang-undang Pemajuan Kebudayaan, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Ajuan Prosedur Standar program bersih laut pulau-pulau kecil, bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Ajuan Prosedur Standar program destinasi wisata eko-budaya, bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata.

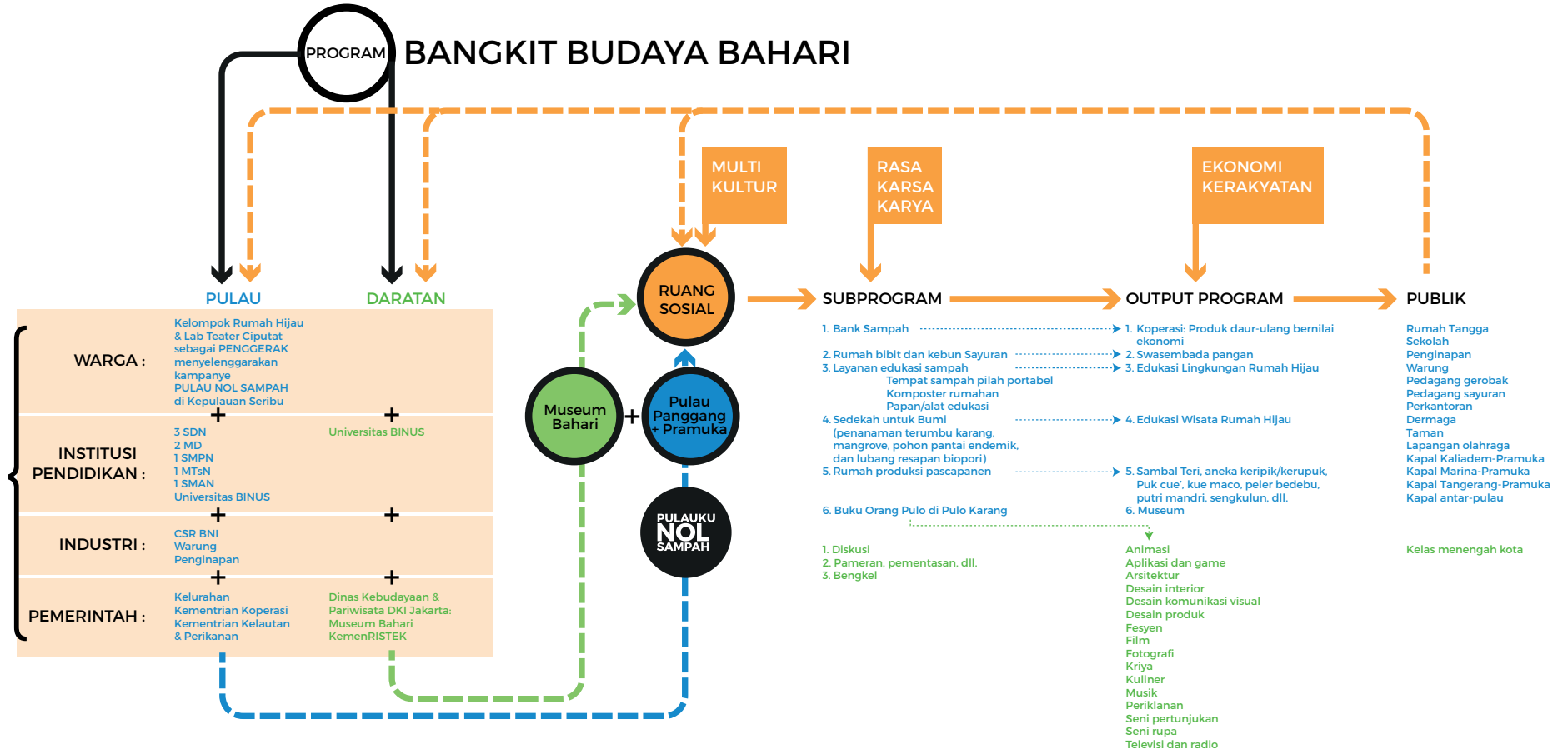
Lima *output* tersebut diharapkan dapat diadopsi, adaptasi dan diimplementasi di pulau-pulau dan kawasan pesisir di seluruh Indonesia.

Outcome yang akan diraih oleh program Bangkit Budaya Bahari adalah ikut menjawab NAWACITA, khususnya pada:

- Butir 1.3. tentang Kedaulatan maritim;
- Butir 2.2. tentang Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
- Butir 2.6. tentang Membuka partisipasi publik;
- Butir 4.8. tentang Melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal;
- Butir 6.7. tentang Membangun sejumlah *science* dan *technopark* di kawasan politeknik dan sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini;
- Butir 7. tentang Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Butir 8.5. tentang Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek;
- Butir 9. tentang Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

PROGRAM BANGKIT BUDAYA BAHARI

QUADRA
HELIX



PENUTUP

Pése adalah semangat yang dihembuskan di dalam program Bangkit Budaya Bahari. Pése bermakna ‘rasa kemanusiaan adil beradab, yang menyalakan semangat rela berkorban’. Makna ini yang menjadi etos gerakan Bangkit Budaya Bahari yang sejak September 2017 digagas dan dikawal oleh aikon - Yayasan Pikir Buat Nusantara. Gerakan ini merefleksikan, bahwa sejatinya bangsa Indonesia adalah pewaris peradaban bahari, yang perlu mewujud dalam setiap watak, laku, dan tindakan warga negara dalam upaya membangun negeri. Wawasan budaya bahari bukanlah akhir atau konsep yang dipergunakan sebagai obat mujarab penyembuh yang dapat menjawab secara instan segala permasalahan yang ada. Ia adalah gelombang, sebuah proses untuk mewujudkan gugus pengetahuan budaya, yang ombaknya terus membesar menggelora, semakin menajam dan semakin memberdayakan kita di dalam menghadapi tantangan paradigma kebudayaan sebagai haluan pembangunan. Proses ini berjalan perlahan dan rentan terhadap pengulangan tema dan persoalan. Namun, proses ini begitu penting untuk menjamin hari esok yang lebih baik bagi negeri ini.

Pulauku NOL Sampah merupakan praksis, dari strategi pemajuan kebudayaan yang *tacit*, berupa kegiatan konservasi lingkungan yang mendorong kembalinya budaya bahari secara kongkrit. Kerja bersama antar warga pulau menangani persoalan sampah di pulau merupakan sarana perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan bahari yang mengembalikan martabat. Pulauku NOL Sampah TIDAK dapat hanya merupakan kegiatan di dalam ‘bilik’ lingkungan hidup yang berdiri sendiri. Ia perlu didampingi kekuatan ekspresi dan kinerja kesenian lokal, seperti yang telah dimulai di 2012 oleh Rumah Hijau dan Teater Lab Ciputat. Melalui ekonomi kerakyatan, multikultur, dan quadra-helix, ruang-ruang sosial yang mengedepankan rasa, karsa, dan karya akan terbangun kebudayaan adiluhung di dalam lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan.

Pése kami jadikan nama sebuah program kolaboratif di aikon - Yayasan Pikir Buat Nusantara. Masalah yang juga dijumpai dalam program pése adalah masalah ideologi patrilineal. Di banyak kasus kehadiran tokoh/figur berotoritas, secara sadar atau tidak, selalu ditunggu. Figur sederhana yang berintegritas dengan kelengkapan otoritas seperti uang dan kekuasaan ini dibutuhkan sebagai pemacu kerja yang dapat bergerak lebih efektif, demi meraih situasi yang di luar kebiasaan - kondisi yang luar biasa. Indonesia perlu memperbanyak figur semacam ini, figur seperti: Presiden Joko Widodo, Menteri Susi Pudjiastuti, dan lainnya. Adalah sebuah harapan bahwa dengan pése pemajuan kebudayaan Indonesia akan bergulir sampai jauh.

VISI
Menjadi Indonesia yang Berkah, Mandiri dan Berkeadilan Berkelanjutan Caring Ruyung

TRISAKTI

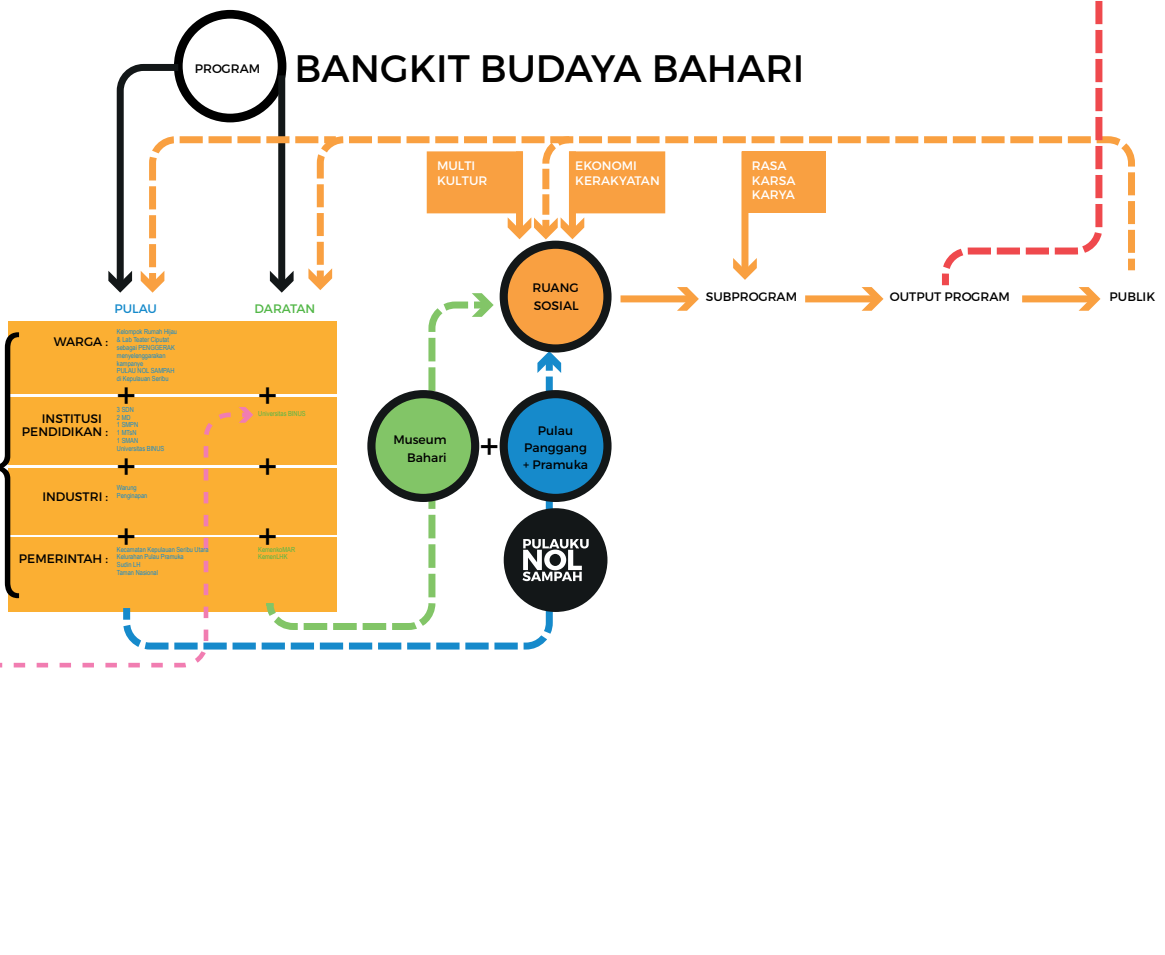
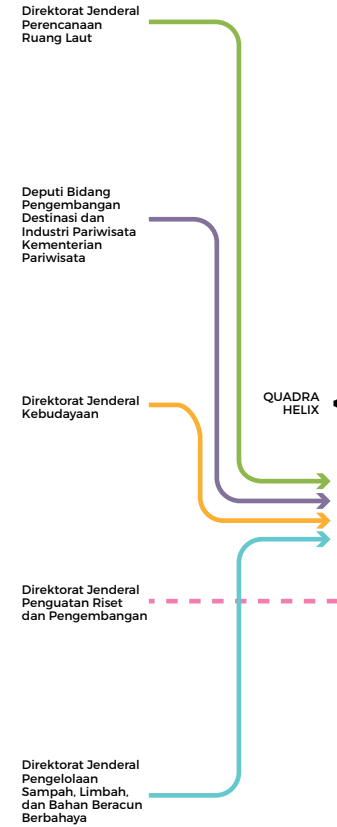
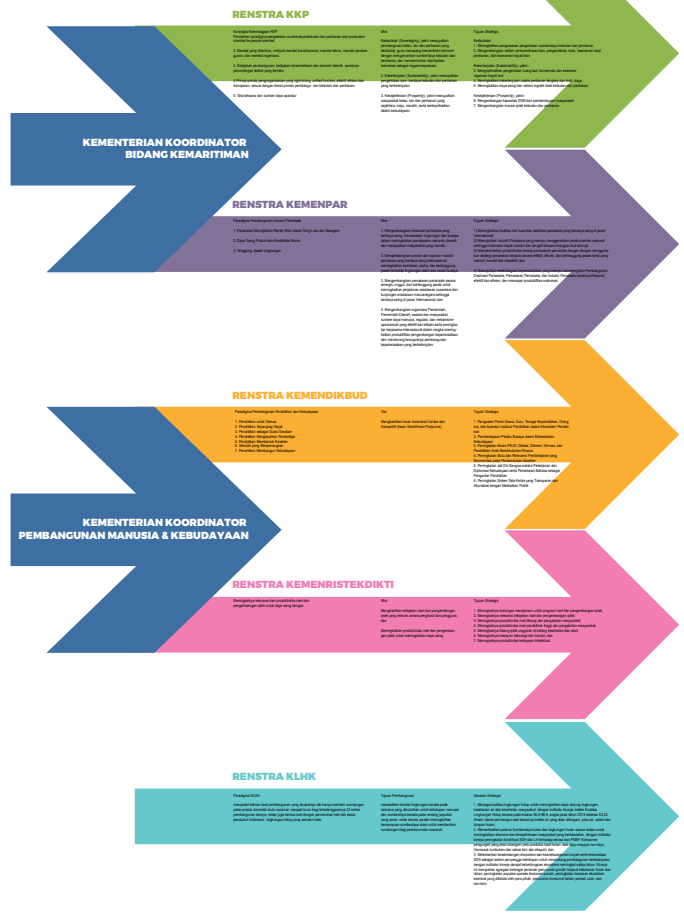
1. Meningkatkan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai lembaga yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional.
2. Meningkatkan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai lembaga yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional.
3. Meningkatkan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai lembaga yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional.

MISI

1. Meningkatkan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai lembaga yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional.
2. Meningkatkan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai lembaga yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional.
3. Meningkatkan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai lembaga yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional.

NAWACITA

1. Meningkatkan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai lembaga yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional.
2. Meningkatkan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai lembaga yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional.
3. Meningkatkan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai lembaga yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional.



BANGKIT BUDAYA BAHARI



aikon - Program Pése
Yayasan Pikir Buat Nusantara
Kemang Selatan XIIA no.18
Jakarta 12410
Indonesia
www.aikon.org